

Suara Perlawanan: Bagaimana Mahasiswa Menggunakan Pembangkangan Sipil pada Unjuk Rasa Tolak Kenaikan BBM di Indonesia

Voices of Resistance: How Students are Using Civil Disobedience in Protest against Fuel Price Rise Policy in Indonesia

Raidah Intizar Yusuf¹, Andini Hamdi², Rahmah Fitriana³

^{1&3}Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Islam Makassar

²Departemen Pascasarjana Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Hasanuddin

Korespondensi: raidahintizar.dty@uim-makassar.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the forms of disobedience that occurred in protests against increased fuel prices in September 2022. The study uses qualitative methods such as interviews, news analysis, and literature review to understand how civil disobedience was used by students as a form of political activism. Findings show that the students employed tactics such as road blockades, gas station boycotts, and tanker/truck takeovers as forms of disobedience. These actions align with the principles of prudence, communication, publicity, and non-violence in the theory of civil disobedience. The study concludes that despite the use of civil disobedience, the protests did not lead to policy reform and highlights the need for strong leadership, support, and determination for success in a protest.

Keywords: Demonstration; civil disobedience; political activism; student; activist

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk ketidakpatuhan yang terjadi dalam protes terhadap kenaikan harga BBM pada September 2022. Studi ini menggunakan metode kualitatif seperti wawancara, analisis berita, dan kajian literatur untuk memahami bagaimana pembangkangan sipil digunakan oleh mahasiswa sebagai bentuk aktivisme politik. Temuan menunjukkan bahwa para mahasiswa menggunakan taktik seperti blokade jalan, boikot pom bensin, dan pengambilalihan truk tangki/truk sebagai bentuk ketidaktaatan. Tindakan tersebut sejalan dengan prinsip kehati-hatian, komunikasi, publisitas, dan nir-kekerasan dalam teori pembangkangan sipil. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun menggunakan pembangkangan sipil, protes tersebut tidak mengarah pada reformasi kebijakan dan menyoroti perlunya kepemimpinan yang kuat, dukungan, dan tekad untuk sukses dalam aksi protes.

Kata kunci: Demonstrasi; pembangkangan sipil; aktivisme politik; mahasiswa; aktivis

PENDAHULUAN

BBM atau bahan bakar mesin merupakan kebutuhan mendasar masyarakat agar dapat bergerak dan mencari penghidupan. Kebijakan pengalihan subsidi BBM, dalam hal ini mencabut subsidi BBM pada tahun 2022, dianggap akan memiliki *multiplier effect* terhadap sejumlah aspek kehidupan masyarakat (Juliana et al., 2022). Oleh karena itu, mahasiswa bergerak dalam serangkaian aksi protes untuk menolak kebijakan tersebut.

Demonstrasi sering digunakan sebagai gerakan protes mahasiswa terhadap berbagai kebijakan. Demonstrasi dilakukan sebagai protes terhadap kondisi politik dan ekonomi

(Fomunyan, 2017; Kebung, 2017). Praktik kekerasan sering digunakan mahasiswa ketika menyampaikan protes terhadap kebijakan negara, namun seringkali protes mahasiswa dibungkam dengan kekerasan (Aminah, 2012; Barker, 2008; Fomunyan, 2017; Makunike, 2015; Mankoff & Flacks, 1971; Mashayekhi, 2001; Pezza, 1995). Demonstrasi mahasiswa seringkali berakhir dengan kerusuhan, baik antara mahasiswa dengan warga masyarakat pengguna jalan maupun antara mahasiswa dengan aparat kepolisian (Marijan & Fitrianto, 2013). Pembangkangan sipil yang diterapkan mahasiswa dalam aksi protes merupakan salah satu pemicu kekerasan tersebut, meski pada

dasarnya pembangkangan sipil merupakan sebuah strategi yang diterapkan pada demonstrasi memiliki peran yang signifikan dalam sejarah mahasiswa sebagai aktivis politik.

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami gelombang protes dan kerusuhan sipil yang dipicu oleh masalah ekonomi dan politik. Protes tersebut melibatkan tindakan pembangkangan sipil, seperti pemogokan, boikot, dan aksi duduk. Para pengunjuk rasa juga menggunakan taktik seperti membarikade jalan, memblokir gedung-gedung pemerintah, dan menduduki ruang publik untuk menarik perhatian pada tujuan mereka. Gelombang protes tersebut akhirnya menyebabkan pengunduran diri Presiden Suharto, yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun (Slater, 2023). Pembangkangan sipil sendiri adalah sebuah aksi yang melibatkan pelanggaran hukum secara sengaja yang memiliki tujuan sosial. Hingga saat ini aksi protes atau demonstrasi mahasiswa masih menerapkan pembangkangan sipil, tidak terkecuali dalam respon atas kenaikan BBM pada awal September 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pembangkangan sipil yang terjadi dalam rangkaian demonstrasi tolak kenaikan BBM, di mana penelitian ini hendak mengetahui apakah pembangkangan sipil merupakan strategi yang efektif untuk mencapai pemenuhan tuntutan atau reformasi kebijakan.

Aktivisme dan Pembangkangan Sipil

Aktivisme politik dilansir dari *Encyclopedia of Information Science and Technology* adalah sebuah bentuk upaya aktif baik langsung maupun tidak langsung (melalui media dalam jaringan) yang bertujuan untuk menciptakan kesadaran atas sebuah isu yang diangkat guna menghasilkan reformasi politik. Dalam beberapa tahun terakhir aktivisme politik dibagi ke dalam bentuk aktivisme online dan offline yang juga dapat diterjemahkan sebagai partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum dapat dimaknai sebagai keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi sebuah kebijakan politik. Sehingga partisipasi politik online dapat dimaknai sebagai upaya-upaya masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan

keputusan pemerintah melalui penggunaan media dalam jaringan (Yusuf, 2023).

Di sebuah negara yang menjamin kebebasan berpendapat masyarakat, aksi unjuk rasa merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan baik tuntutan maupun dukungannya atas sebuah kebijakan. Aksi unjuk rasa merupakan sebuah bentuk aktivisme politik yang dijalankan oleh para mahasiswa, yang kemudian diklaim sebagai aktivis, di mana aktivis adalah satu fragmen masyarakat yang menjadi penyuar atas tuntutan masyarakat yang kepentingannya terancam oleh status quo (Yusuf, 2023). Aksi unjuk rasa sering dilakukan dalam bentuk unjuk rasa damai dan unjuk rasa anarkis, unjuk rasa damai ialah unjuk rasa yang memiliki izin pada tempat yang lazim dilakukannya aksi unjuk rasa, sedangkan unjuk rasa anarkis adalah unjuk rasa yang mengancam kenyamanan masyarakat dengan blokade, hingga keamanan publik dengan bentrok antar anggota masyarakat namun status tersebut sering tidak nampak di awal pelaksanaan unjuk rasa, melainkan setelah unjuk rasa dijalankan dengan melihat bagaimana eskalasi tindak kekerasan pada aksi tersebut. Pembangkangan sipil kerap kali disamakan dengan unjuk rasa anarkis, meski kedua hal tersebut berbeda pada prinsipnya.

Pembangkangan sipil merupakan bagian dari demonstrasi, dalam bahasa asalnya "*civil disobedience*" pertama kali diperkenalkan oleh Henry David Thoreau dalam esainya tahun 1848 untuk menggambarkan penolakannya atas aturan membayar pajak wajib yang diterapkan oleh pemerintah Amerika, di mana pajak tersebut dipergunakan untuk memantik perang di Meksiko, serta dalam rangka penegakan Hukum Budak Buronan (*the Fugitive Slave Law*), yakni hukum yang membolehkan negara memulangkan budak kepada tuannya meskipun mereka berada di negara bebas. Thoreau sendiri beberapa kali dijebloskan ke penjara karena aksi protesnya (Delmas & Brownlee, 2021).

Sepanjang sejarah, tindakan pembangkangan sipil diketahui dapat membantu bahkan memaksa penilaian ulang

parameter moral masyarakat. Perlawanan terhadap kekuasaan Inggris di India yang dipimpin oleh Gandhi, gerakan hak-hak sipil AS yang dipimpin oleh Martin Luther King Jr., perlawanan terhadap apartheid di Afrika Selatan, aksi duduk mahasiswa untuk menolak Perang Vietnam, hingga pada aksi pendudukan gedung DPR oleh mahasiswa pada tahun 1998 untuk menggulingkan pemerintah orde baru adalah sejumlah contoh di mana pembangkangan sipil terbukti menjadi mekanisme penting untuk perubahan sosial.

Ciri-ciri tertentu dari pembangkangan sipil tampaknya penting tidak hanya untuk dampaknya terhadap masyarakat dan pemerintah, tetapi juga untuk statusnya sebagai pelanggaran hukum yang berpotensi dapat dibenarkan. Berberapa ciri-ciri yang penting pada pembangkangan sipil antara lain.

1. Kehati-hatian: Pembangkangan sipil sering ditandai dengan kehati-hatian, yang mencerminkan ketulusan, keyakinan moral, dan niat serius yang menentang hukum. Banyak orang yang terlibat dalam pembangkangan sipil percaya bahwa mereka bertindak sesuai dengan martabat, prinsip moral, dan kepentingan terbaik masyarakat mereka dengan memprotes undang-undang atau kebijakan yang mereka anggap tidak adil atau perlu diubah. Melalui tindakan ketidaktaatan mereka, mereka berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong peninjauan ulang atau penolakan terhadap undang-undang dan kebijakan ini.
2. Komunikasi: Saat terlibat dalam pembangkangan sipil, individu seringkali memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Selain mengekspresikan penentangan mereka terhadap undang-undang atau kebijakan tertentu, mereka juga bertujuan untuk menarik perhatian publik terhadap isu-isu ini dan mengadvokasi perubahan undang-undang atau kebijakan yang bersangkutan. Melalui tindakan ketidaktaatan mereka,

mereka berusaha untuk mengkomunikasikan pandangan mereka dan menggembelng orang lain untuk bergabung dalam upaya mereka membawa perubahan.

3. Publisitas: Menurut Rawls, pembangkangan sipil tidak boleh diselimuti kerahasiaan, melainkan harus dilakukan secara terbuka dan terbuka. Faktanya, otoritas hukum yang dilanggar mungkin perlu ditonjolkan untuk mengomunikasikan pesan protes secara efektif dan untuk menggalang dukungan untuk tujuan tersebut. Pembangkangan sipil harus dilakukan dengan cara yang transparan dan terbuka untuk pengawasan publik.
4. Nir-kekerasan: Penggunaan aksi nir-kekerasan adalah elemen kunci dari pembangkangan sipil, dan sering dianggap penting untuk meminimalkan konsekuensi negatif dan mengurangi kemungkinan konflik kekerasan. Beberapa bahkan berpendapat bahwa non-kekerasan adalah karakteristik pembangkangan sipil. Rawls berpendapat bahwa kekerasan adalah tidak sesuai dengan pembangkangan sipil, karena cenderung meningkatkan ketegangan dan merusak tujuan protes. Namun, penting untuk menyadari bahwa setiap tindakan ketidaktaatan pasti dapat berbenturan dengan kepentingan mereka yang menentangnya, dan dapat menyebabkan konflik atau perlawanan (Delmas & Brownlee, 2021).

Pembangkangan sipil jika dikaitkan dengan aksi nir-kekerasan adalah aksi yang meliputi blokade, boikot, aksi duduk, tidak membayar pajak, dan dengan sengaja tidak mematuhi hukum tertentu yang dianggap tidak adil. Cara-cara tersebut adalah cara yang kerap ditempuh sebagai bentuk pembangkangan sipil tanpa kekerasan agar dapat mempromosikan perubahan politik. Taktik pembangkangan sipil

secara definitif merupakan hal yang melanggar hukum atau ilegal, sehingga individu yang melakukan tindakan ini memiliki risiko penangkapan, denda, dan bahkan penjara. Tindakan pembangkangan sipil yang bersifat nir-kekerasan dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian pada target tertentu seperti dalam boikot, terkadang dimaksudkan untuk mencegah beberapa tindakan dari pihak lain seperti pada blokade, atau sekedar untuk menarik perhatian pada suatu masalah, seperti dalam aksi duduk. Pembangkangan sipil dan aksi tanpa kekerasan adalah strategi yang sulit dilakukan oleh kelompok masyarakat mengingat meskipun beberapa aksi nir-kekerasan seperti boikot cukup legal dan tergolong ringan, banyak tindakan lain yang benar-benar melanggar hukum. Sehingga masyarakat yang melakukan aksi tersebut sangat mudah digambarkan hanya sebagai pengganggu atau bahkan kriminal karena tidak menghormati hukum dan mengganggu ketentraman masyarakat. Sering pula tindakan pembangkangan dianggap tidak konstruktif oleh lawan. Sehingga dalam pelaksanaan aksi pembangkangan meskipun bersifat nir-kekerasan tetap tidak menjamin respon tanpa kekerasan oleh aparat.

Tabel 1. Bentuk dan Hasil Aksi Tanpa Kekerasan

Bentuk Pembangkangan Sipil	Hasil
Protes	Konversi
Aksi tidak kooperatif	Akomodasi
Intervensi	Koersi tanpa kekerasan

Sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1 secara umum, aksi tanpa kekerasan memiliki tiga bentuk antara lain: protes, di mana protes akan menghasilkan konversi atau perubahan arah dalam kebijakan; aksi tidak kooperatif, di mana aksi ini akan menghasilkan akomodasi atas tuntutan demonstran, dan intervensi yang boleh jadi pihak lawan tidak berubah dalam pandangan atau praktik, namun mereka kehilangan kekuatan untuk memaksakan preferensi mereka terhadap demonstran (Texas Politics - Civil Disobedience and Non-Violent Action, n.d.).

Beberapa contoh pembangkangan sipil adalah

1. Aksi protes secara damai di jalan-jalan, meskipun itu berarti memblokir lalu lintas atau

mengganggu arus bisnis yang normal;

2. Menolak untuk membayar pajak atau biaya yang dianggap tidak adil atau tidak etis;
3. Berpartisipasi dalam aksi duduk atau boikot, seperti menolak berbelanja di toko tertentu atau menggunakan produk tertentu;
4. Tidak mematuhi perintah atau hukum yang dianggap tidak etis atau salah secara moral, seperti menolak ikut serta dalam aksi militer;
5. Menempati ruang publik, seperti taman atau gedung, sebagai cara untuk membuat pernyataan atau menarik perhatian suatu sebab;
6. Melanggar hukum atau aturan dengan cara tanpa kekerasan, seperti masuk tanpa izin ke properti terlarang atau terlibat dalam tindakan vandalisme.

Setelah memahami pengertian teori dari pembangkangan sipil, maka dapat disimpulkan bahwa pembangkangan sipil berbeda dengan aksi anarkis yang melibatkan kekerasan. Pembangkangan sipil melibatkan perencanaan matang yang bertujuan mengkomunikasikan ketidaksetujuan dengan tindakan yang nir-kekerasan, meski tindakan tersebut akan dipandang merugikan bagi sejumlah pihak, namun demikian pembangkangan sipil tidak memiliki indikasi membahayakan keselamatan jiwa anggota publik sebagaimana yang ditemui pada aksi anarkis yang melibatkan bentrok.

Tidak banyak penelitian yang secara spesifik membahas pembangkangan sipil, beberapa di antaranya ialah Tumpal Daniel S pada tahun 2020 yang membahas ketidakpatuhan sipil pada mahasiswa dan kaitannya dengan peraturan dan pedoman yang terkait pada KKNi dan SNPT khususnya pada mata kuliah Pendidikan agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Daniel menjelaskan fenomena ketidakpatuhan sipil (*Civil Disobedience*) kian meningkat di periode kedua Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Pergerakan masyarakat sipil dapat terpantau lewat percakapan di media sosial

untuk mengajak masyarakat tidak percaya kepada lembaga-lembaga resmi negara dan kebijakannya. Melalui mobilisasi di media sosial yang masif, maka terjadilah unjuk rasa buruh dan mahasiswa atas pengesahan UU Cipta Kerja. Mahasiswa yang pada mulanya hanyalah subordinasi gerakan penolakan Omnibus law dalam perjalanan menjadi faktor determinan dari aksi-aksi ketidakpatuhan sipil yang diamati di lapangan (Daniel, 2020).

Tindak pembangkangan sipil di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa selaku aktivis, sebuah pembangkangan sipil yang cukup fenomenal adalah aksi duduk yang dilakukan petani Kendeng yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK), atas pembangunan pabrik semen di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah yang mencakup Rembang, Pati, Grobogan, Wonogiri, Gombong dan kabupaten lainnya. Penelitian Enkin Asriwijaya atas Gerakan petani Kendeng menyimpulkan bahwa gerakan tersebut berbasis penolakan pendirian pabrik semen, di mana pendirian pabrik semen tersebut dianggap merupakan keberpihakan kebijakan negara pada sistem neoliberalisme. Gerakan petani Kendeng berawal dari perilaku dan aksi kolektif berangkat dari rasa keterampasan yang mendasari perlawanan atas pemerintahan oligarki dan para sekutu kapitalis pemerintahan. Melalui sejumlah aksi terbuka, aktif bahkan advokatif, petani Kendeng belum bisa menjalin komunikasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi petani yang diangkat. Gerakan tersebut memandang bahwa pemanfaatan ekosistem guna mendukung kedaulatan pangan nasional sebagaimana arahan pemerintah malah tidak dibarengi dengan penyediaan lahan serta kemudahan dalam sistem untuk mendukung produktifitas masyarakat agraris. Sebaliknya pemerintah hanya menampilkan jargon-jargon semata dan tidak mengatasi permasalahan dominan yang kian kompleks. Beberapa usaha yang dicanangkan oleh JM-PPK yakni aksi duduk, serta upaya berkelanjutan untuk mengangkat simbol identitas komunitas adat Samin atau Sedulur Sikep (Asrawijaya, 2021).

Pembangkangan sipil juga banyak diteliti sebagai sebuah bentuk aktivisme pada level internasional. School strike 4 climate dan Extinction rebellion sebagai contoh merupakan aktivisme lingkungan hidup yang dilakukan dalam rangka memprotes kebijakan pemerintah yang dinilai akan merusak lingkungan, bahkan masa depan anak-anak sebagai pihak yang sangat terdampak atas kebijakan zero net emission 2050. Pembangkangan sipil yang dilakukan pada aktivisme lingkungan hidup tersebut berbentuk aksi mogok sekolah dan aksi unjuk rasa oleh siswa dan atau mahasiswa. Aksi ini dimulai sejak tahun 2018, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) mencatat aksi sipil sejak 2018 sebagian besar telah dipimpin oleh siswa di sekolah atau di universitas. Kelompok-kelompok ini telah tereduksi mengenai perubahan iklim serta memiliki pemahaman tentang sains, dan melihat perlunya tindakan sesegera mungkin untuk menanganinya (Thackeray et al., 2020).

Gerakan *School strike 4 climate* diprakarsai dan dipimpin oleh remaja Swedia, Greta Thunberg. Sebagaimana gerakan kontemporer lainnya, *School Strike 4 Climate* di samping melakukan aksi mogok sekolah, juga menampilkan aksi tersebut di media sosial. Sebuah penelitian oleh Shelley Boulianne, Mireille Lalancette, dan David Ilkiw menggunakan data jejak Twitter untuk memeriksa dinamika global pemogokan pada siswa/mahasiswa pada 15 Maret 2019. Penelitian tersebut menganalisis 993 tweet di Twitter yang memiliki nuansa pemogokan dengan menggunakan kombinasi analisis kualitatif dan kuantitatif. Penelitian tersebut menyimpulkan fungsi utama dari tweet ini adalah untuk berbagi informasi, serta memiliki fungsi unik sebagai dokumentasi kegiatan aksi sipil lokal yang bertempat di seluruh penjuru dunia. Di samping temuan itu, Boulianne, Lalancette, dan Ilkiw juga memeriksa pendapat yang dibagikan tentang pemuda, taktik (protes/pemogokan), dan perubahan iklim, serta pembebanan kesalahan pada pemerintah dan lembaga lain atas kelambanan dan tidak adanya tindakan mereka untuk menangani krisis iklim. Pemogokan iklim global ini mencerminkan tren kegiatan

protes internasional, yang terhubung melalui media sosial dan platform digital lainnya. Secara umum, kegiatan protes berskala internasional tersebut memungkinkan kita untuk memikirkan kembali bagaimana platform media sosial mengubah keterlibatan politik dengan menawarkan para pelaku, utamanya generasi muda, sebuah agensi dengan memanfaatkan kemampuan untuk menyuarakan keprihatinan mereka kepada khalayak (Boulianne et al., 2020).

Boikot sebagai protes juga merupakan bentuk ketidakpatuhan sipil, sebagaimana dalam penelitian Sriram Ananth yang meneliti mengenai *Boycott, Divestment and Saction (BDS) Movement*, yakni sebuah gerakan yang digawangi 170 organisasi sipil Palestina untuk memboikot produk Israel secara lebih terarah dalam rangka politik solidaritas. Aksi ini mengajak masyarakat internasional untuk peduli pada Palestina yang telah dijajah oleh Israel dan berencana mencanangkan gerakan BDS sampai dengan Israel memenuhi kewajibannya untuk 1) mengakhiri okupasi dan penjajahan serta merubuhkan dinding perbatasan, 2) mengakui hak fundamental warga Arab-Palestina secara setara, dan 3) menghargai dan mempromosikan hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanahnya serta property miliknya sesuai dengan resolusi PBB 1949 (Ananth, 2013).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara yang dilakukan pada bulan September 2022, observasi dan tinjauan terhadap liputan media tentang demonstrasi, khususnya yang melibatkan kekacauan sipil, baik dari sumber arus utama maupun lokal. Selain itu, tinjauan pustaka terhadap teori dan praktik demonstrasi pembangkangan sipil dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Ketidakpatuhan Sipil ditinjau dari Pemberitaan Media

Pemberitaan mengenai unjuk rasa tolak kenaikan BBM yang diiringi dengan aksi pembangkangan atau ketidakpatuhan sipil dapat ditemui pada hampir semua portal media, baik media mainstream, maupun media lokal, mengingat kenaikan BBM berlaku secara nasional. Beberapa bentuk ketidakpatuhan sipil yang telah dirangkum dapat diamati pada tabel di bawah.

Tabel 2. Bentuk Ketidakpatuhan Sipil ditinjau dari Berita

No	Judul Berita	Tanggal terbit	Media	Lokasi	Bentuk Ketidakpatuhan Sipil
1.	Blokade Tangki Pertamina, Kapolres Pamekasan Ancaman Pidanan Mahasiswa	8 September 2022	Memox	Pemekasan	Penyanderaan Mobil Tangki
2.	Demo Tolak BBM, Mahasiswa Sandera Mobil Pengangkut BBM	14 September 2022	Kompas	Kendari & Makassar	Penyanderaan Mobil & Penerobosan Pagar Gedung DPRD
3.	Sempat Blokade Jalan, Mahasiswa Surabaya Kembali Demo Tolak Kenaikan BBM	14 September 2022	Detik	Surabaya	Blokade Jalan
4.	Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Ratusan Mahasiswa Sempat Blokade Jalan Pantura Rembang	8 September 2022	Lingkar Jateng	Rembang	Blokade Jalan
.	Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa Unpatti Ambon Blokade Jalan dan Desak Jokowi Mundur	9 September 2022	Kompas	Ambon	Blokade Jalan
6.	Demo	9	Kompas	Makassa	Penutupan

	BBM, Mahasiswa Cipayung Plus Mau Tutup SPBU se-Makassar !	September 2022		r	paksa SPBU
7.	Mahasiswa blokada jalan di depan gedung DPR Aceh	29 September	Popularity	Aceh	Blokade Jalan
8.	Blokade Jl MH Thamrin, Jakpus, Massa Mahasiswa Saling Dorong dengan Polisi	30 September 2022	Detik	Jakarta	Blokade Jalan

Dari sejumlah berita pada Tabel 2, ketidakpatuhan sipil dalam demonstrasi mahasiswa terjadi tidak hanya terpusat pada satu lokasi, namun di setiap tempat terjadinya unjuk rasa melibatkan satu bentuk ketidakpatuhan sipil, baik di kota maupun kabupaten. Beberapa yang dapat disimpulkan sebagai bentuk ketidakpatuhan sipil ialah blokada jalan, penyanderaan mobil, penerobosan, dan penutupan paksa. Blokade jalan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum, di mana hukum yang dilanggar ialah Pasal 192 KUHP. Blokade jalan yang dilakukan oleh demonstran dapat mengganggu ketertiban, sehingga seringkali memicu bentrok antara mahasiswa dan polisi sebagaimana yang dilaporkan oleh media. Penyanderaan, pembajakan atau sabotase mobil baik itu mobil tangki SPBU dan truk juga merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum, sebagaimana penjelasan Ekonom Defiyan Cori bahwa sabotase mobil tangki SPBU adalah tindakan yang melawan pemerintahan, kepentingan publik, atau dengan kata lain melanggar konstitusi ekonomi karena mengganggu hajat ekonomi publik. Demikian pula penutupan paksa SPBU merupakan bentuk pelanggaran hukum karena sama halnya dengan sebuah bentuk sabotase sebagaimana dijelaskan sebelumnya yang melanggar konstitusi ekonomi.

Evaluasi Pembangkangan Sipil dalam Aksi Tolak Kenaikan BBM

Ketidakpatuhan atau pembangkangan sipil yang secara umum melanggar hukum tersebut dapat disebut sebagai sebuah aksi yang anarkis apabila tidak melalui sejumlah perencanaan sebelumnya, di mana perencanaan merupakan indikasi dari kehati-hatian yang merupakan fitur penting pada sebuah bentuk pembangkangan sipil, di samping komunikasi, publisitas, dan sifatnya yang nir-kekerasan (Delmas & Brownlee, 2021).

Pembangkangan sipil dalam bentuk sabotase SPBU sebagai contoh merupakan sebuah bentuk pembangkangan sipil yang telah melalui proses pertimbangan oleh segenap organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus mencakup Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDHI). Sebuah meme beredar di linimasa masyarakat kota Makassar pra terjadinya pembajakan SPBU, di mana meme tersebut berguna untuk memobilisasi mahasiswa untuk turut serta bergabung dalam aksi pembangkangan sipil, serta memperingatkan khalayak luas mengenai aksi tersebut sehingga masyarakat dapat bersiaga sebelum terjadinya penutupan paksa SPBU oleh mahasiswa.



Gambar 1. Meme Blokade SPBU Se-Kota Makassar

Hasil wawancara pada dua narasumber juga mengonfirmasi bahwa aksi pembakaran ban untuk memblokade jalan, dan juga penyanderaan truk dilakukan setelah melalui proses perencanaan yang diamati dalam observasi lapangan, menjadi opsi usaha agar aspirasi dapat direspon oleh pemerintah serta upaya penolakan tegas atas kebijakan pemerintah untuk mempertimbangkan ulang kebijakannya, atau demonstran mengancam akan melakukan unjuk rasa seterusnya.

Dalam hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa pembangkangan sipil dalam bentuk blokade jalan merupakan simbol kritik keras atas kebijakan pemerintah.

“Pembakaran ban itu adalah simbolisasi kritik keras kita terhadap apa yang menjadi kebijakan dan keputusan yang diambil pemangku kebijakan. Ban itu adalah symbol perlawanan dan ban itu bagian kita dalam menyatukan gerakan. Tujuan pemblokadean jalan adalah proses pelaksanaan gerakan itu membuahkan hasil dengan cara membuat tidak seimbang aktifitas masyarakat misalnya itu akan membuat tekanan kepada pemerintah ataupun orang-orang yang mengeluarkan kebijakan sehingga dengan adanya kemacetan atau sesuatu yang berjalan tidak sesuai prosedur maka itu adalah usaha kita untuk meyakinkan pemimpin-pemimpin dan orang yang bertanggung jawab.” (Wawancara Muhammad Arsyi Jailolo, 15 September 2022)

Di samping merupakan sebuah simbol kritik keras, blokade jalan dilakukan sebagai upaya pemusatan perhatian sehingga apa yang disampaikan oleh demonstran sebagai

penyambung lidah masyarakat dapat didengarkan oleh pengambil kebijakan.

“Kami ingin sampaikan bahwa aksi pemblokadean jalan itu bukan berarti atas nama hak dan secara pribadi tapi kami lakukan untuk masyarakat. Bagi kami itu penyampaian-penyampaian yang kami lakukan jika dewan perwakilan rakyat tidak mendengarkan apa yang kami sampaikan agar mereka melihat. Jika memang tidak menginginkan pemblokadean jalan maka tolong dengarlah keluh kesah kami, terima aspirasi kami sehingga kami tidak terusterusan melakukan seperti ini.” (Wawancara Sukirman S Doturu, 15 September 2022)

Aspek komunikasi adalah hal yang penting dalam pembangkangan sipil di mana dengan komunikasi, demonstran berusaha tidak hanya untuk menyampaikan penolakan dan kecemasannya terhadap undang-undang atau kebijakan tertentu, tetapi juga untuk menarik perhatian publik pada masalah khusus ini dan dengan demikian mendorong perubahan dalam undang-undang atau kebijakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya-upaya pembangkangan sipil dilakukan untuk menekan pihak terkait.

“.... sebenarnya tergantung di mana kita melakukan unjuk rasa, penekanan dan apa yang menjadi dasar kita melakukan cara untuk menyelesaikan itu semua. Tetapi saya biasanya dengan anak-anak terkadang melakukan hal-hal yang agak brutal non stoplah dengan cara-cara bakar ban misalnya, menggoyang-goyangkan pagar agar kepanikan yang muncul dalam kantor pemangku kebijakan agar mereka perhatikan penyampaian aspirasi.” (Wawancara Muhammad Arsyi Jailolo, 15 September 2022)

Di samping sebagai upaya menekan, aksi ketidakpatuhan juga ditujukan kepada masyarakat secara terbuka (bersifat publik) sehingga lebih banyak masyarakat akan peduli pada isu yang diangkat.

“Gerakan massa aksi itu kami mengajak seluruh masyarakat untuk bergabung agar bagaimana aksi itu untuk menyuarakan. Entah di dengar atau tidak di dengar kami akan suarakan penolakan ini. Makanya pemblokadean jalan ini agar masyarakat terpanggil dengan itu. Apabila tidak ada yang

terpancing dalam hal itu maka kami akan lakukan terus supaya masyarakat betul-betul sadar betul bahwa yang kami lakukan untuk mereka.” (Wawancara Sukirman S Doturu, 15 September 2022)

Sebuah aksi pembangkangan sipil juga didebatkan merupakan aksi nir-kekerasan, beberapa ahli bahkan tegas dalam penekanannya bahwa pembangkangan sipil haruslah tanpa kekerasan, namun di lapangan, demonstran menghadapi sejumlah variabel yang dapat memicu tindak kekerasan, meski kekerasan tidak masuk dalam perencanaan pada pembangkangan sipil.

“...kadang muncul kekerasan, sesuatu yang tidak diinginkan. Ketika semua massa, kedua belah pihak sudah capek, kekurangan tenaga, kekurangan energi, psikologinya terganggu, terkadang sih yang brutal teman terpancing atau provokator biasa. Biasanya aparat kepolisian juga terkadang biasa offside dalam melakukan penanganan aksi.” (Wawancara Muhammad Arsyi Jailolo, 15 September 2022)

Kondisi lapangan yang sarat emosi, di samping penyusup yang sengaja memprovokatori, serta tindak represi dari aparat merupakan sejumlah variabel dapat memancing kekerasan.

PEMBAHASAN

Demonstrasi sering digunakan sebagai gerakan protes mahasiswa terhadap berbagai kebijakan. Demonstrasi dilakukan sebagai protes terhadap kondisi politik dan ekonomi (Fomunyam, 2017; Kebung, 2017). Praktik kekerasan sering digunakan mahasiswa ketika menyampaikan protes terhadap kebijakan negara, namun seringkali protes mahasiswa dibungkam dengan kekerasan (Aminah, 2012; Barker, 2008; Fomunyam, 2017; Makunike, 2015; Mankoff & Flacks, 1971; Mashayekhi, 2001; Pezza, 1995). Demonstrasi mahasiswa seringkali berakhir dengan kerusuhan, baik antara mahasiswa dengan warga masyarakat pengguna jalan maupun antara mahasiswa dengan aparat kepolisian (Marijan & Fitrianto, 2013).

Kerusuhan dan konflik yang timbul dalam aksi kerap kali dipicu oleh aksi pembangkangan sipil yang dilakukan oleh mahasiswa dalam demonstrasi. Termasuk pada

aksi tolak kenaikan BBM pada tahun 2022 yang juga menggunakan strategi tersebut.

Dalam pengamatan, pembangkangan sipil dalam aksi mahasiswa telah memenuhi sejumlah fitur dalam teori yakni aspek kehati-hatian dengan perencanaan, komunikatif melalui penekanan, publisitas karena dilakukan secara terbuka, dan kekerasan bukan sebagai tujuan melainkan efek dari berbagai kondisi lapangan (Delmas & Brownlee, 2021). Di waktu yang sama represi aparat adalah imbas yang diperoleh oleh demonstran oleh karena pembangkangan sipil memang merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum.

Dalam diskusi pembangkangan sipil yang terjadi di Indonesia, blokade jalan merupakan salah satu aksi yang kerap dipilih oleh demonstran untuk memusatkan perhatian, namun efektivitas dari aksi tersebut bahkan masih dipertanyakan oleh aktivis sendiri, dan tidak berhenti sampai di situ, aksi pembangkangan sipil yang sudah-sudah membuat mahasiswa kerap dipandang sebagai bentuk vandal dan kriminal ketika menimbulkan kerusakan dan kerugian. Sementara taktik tanpa kekerasan idealnya dapat dapat menghasilkan lebih banyak simpati dan dukungan publik daripada taktik yang lebih konfrontatif, dan juga dapat lebih efektif dalam membawa perubahan jangka panjang.

Beberapa catatan mengenai rangkaian demonstrasi tolak kenaikan BBM yang relatif tidak membuahkan reformasi kebijakan sebagaimana tuntutan mahasiswa, adalah bahwa jalan pembangkangan sipil telah menemui jalan buntu, dan jikapun strategi ini pernah berhasil di masa lalu, diperlukan sejumlah aspek lainnya untuk mendukung keberhasilan protes mahasiswa dalam mencapai tuntutan mereka.

Sejumlah aspek yang dapat dievaluasi dimulai dari kepemimpinan yang kuat dan terorganisir: Protes yang efektif seringkali memiliki pemimpin yang kuat dan terorganisir yang mampu mengoordinasikan upaya kelompok dan membuat mereka tetap fokus pada tujuan mereka. Menilik sejarah pembangkangan sipil, kepemimpinan transformasional atau pemimpin berkarisma seringkali menjadi penggerak atas aksi, seperti

yang dapat ditemui dalam perlawanan terhadap kekuasaan Inggris di India yang dipimpin oleh Gandhi, serta gerakan hak-hak sipil AS yang dipimpin oleh Martin Luther King Jr (Delmas & Brownlee, 2021). Namun kepemimpinan karismatik tidak lagi banyak ditemui dewasa ini di kalangan mahasiswa, mengingat konsep karisma menjadi kian subjektif seiring waktu apa yang dianggap karismatik oleh seseorang mungkin tidak sama oleh orang lain. Kepemimpinan dipandang sebagai proses yang melibatkan karakteristik individu dan kualitas seseorang, serta bagaimana konteks sosial dan politik di mana mereka beroperasi, dan norma budaya dan masyarakat yang membentuk gaya dan kemampuan kepemimpinan seseorang.

Hal yang juga sangat penting ialah dukungan dan solidaritas yang luas. Semakin banyak orang yang mendukung protes dan bersedia bergabung, semakin besar kemungkinan untuk berhasil. Membangun solidaritas dan mendapatkan dukungan dari kelompok dan organisasi lain dapat membantu meningkatkan pengaruh dan dampak protes. Hal ini terlihat pada aksi boikot yang dilakukan pendukung Palestina dan berhasil memantik semangat anti apartheid di seluruh dunia secara konsisten (Ananth, 2013). Namun demonstrasi yang menggunakan strategi pembangkangan sipil memperoleh sentiment negatif anggota masyarakat, sehingga secara cakupan hal ini membuat dukungan dan solidaritas dari kelompok di luar mahasiswa berkurang. Di samping itu, beberapa mahasiswa mungkin tidak merasa relevan tentang masalah yang diprotes, atau mungkin tidak melihat pentingnya berpartisipasi dalam protes. Orang lain mungkin ragu-ragu untuk terlibat karena takut akan konsekuensi dari pihak berwenang atau orang lain yang tidak setuju dengan protes tersebut. Selain itu, mungkin ada hambatan sosial atau budaya yang menghalangi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam protes, seperti kurangnya kesadaran tentang masalah tersebut atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya solidaritas. Kendala logistik atau praktis juga dapat mempersulit mahasiswa untuk berpartisipasi, seperti kurangnya transportasi atau sumber daya lainnya.

Terakhir dan tidak kalah pentingnya ialah kegigihan dan tekad. Protes terkadang membutuhkan waktu lama untuk mencapai tujuan mereka, dan penting bagi pengunjuk rasa untuk tetap berkomitmen dan gigih dalam upaya mereka, seperti yang terjadi di masa silam bagaimana mahasiswa dengan gigih dan konsisten menuntut turunnya pemerintah (Slater, 2023). Termasuk yang dewasa ini dilakukan oleh aktivis krisis iklim, bagaimana pembangkangan sipil dalam bentuk bolos sekolah yang dilakukan oleh siswa yang memprotes lambatnya tindakan pemerintah atas krisis iklim (Thackeray et al., 2020). Akan tetapi sulit bagi mahasiswa untuk konsisten dalam tuntutan mereka, mereka mungkin tidak melihat pentingnya terus berpartisipasi dalam protes dalam jangka waktu yang lama. Orang lain mungkin menjadi putus asa atau kehilangan motivasi jika mereka tidak segera melihat hasil atau kemajuan, atau jika mereka menghadapi penolakan atau penolakan dari pihak berwenang atau orang lain yang tidak setuju dengan protes tersebut. Selain itu, kendala logistik atau praktis yang mempersulit mahasiswa untuk tetap berpartisipasi dalam protes, seperti kurangnya sumber daya atau dukungan. Beberapa faktor eksternal juga dapat mempengaruhi, seperti tanggapan pemerintah atau pihak berwenang lainnya, yang dapat mempengaruhi kegigihan dan tekad mahasiswa untuk terus mengikuti aksi protes.

Ketiga hal di atas yang mencakup kepemimpinan kuat yang terorganisir, solidaritas dan persistensi dapat dievaluasi pada aksi mahasiswa, sehingga di masa mendatang dapat lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan demonstrasi.

KESIMPULAN

Pembangkangan sipil sebagai sebuah bentuk strategi protes dilakukan di berbagai tempat dengan berbagai cara. Di Indonesia, pada demonstrasi tolak kenaikan BBM yang dijalankan oleh mahasiswa sebagai aktivis pembangkangan sipil mengambil bentuk blokade jalan, pemboikotan SPBU, dan penyanderaan mobil tanki dan truk. Blokade jalan khususnya merupakan aksi ketidakpatuhan sipil yang paling sering dilaksanakan oleh mahasiswa.

Pembangangan sipil dalam demonstrasi tolak BBM memenuhi fitur aksi dalam teori pembangkangan sipil yakni kehati-hatian, komunikasi, publisitas, dan sebagian besar bersifat nir-kekerasan. Akan tetapi hingga saat ini aksi pembangkangan sipil oleh mahasiswa tidak memperoleh hasil berupa konversi kebijakan. Hal ini dapat dievaluasi dengan melihat bagaimana aksi demonstrasi dengan pembangkangan sipil lain yang membuahkan hasil, oleh karena aksi tersebut melibatkan kepemimpinan yang terorganisir, solid, serta konsisten dalam tuntutananya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2012). Konstruksi Sosial Kekerasan dan Vandalisme Mahasiswa. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 25(2), 139–149.
- Ananth, S. (2013). The Politics of the Palestinian BDS Movement. *Socialism and Democracy*, 27(3), 129–143. <https://doi.org/10.1080/08854300.2013.836317>
- Asrawijaya, E. (2021). GERAKAN PETANI KENDENG DALAM MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN PANGANNYA. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.53866/jimi.v1i3.16>
- Barker, C. (2008). Some Reflections on Student Movements of the 1960 s and Early 1970 s. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, 81, 43–91.
- Daniel, T. (2020). Kompetensi Sikap Mahasiswa Terhadap Ketidapatuhan Sipil Pada Kasus Penolakan UU Cipta Kerja. *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 2(2), Article 2.
- Delmas, C., & Brownlee, K. (2021). Civil Disobedience. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2021). Metaphysics Research Lab, Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/win2021/entries/civil-disobedience/>
- Fomunyam, K. G. (2017). Student Protest and The Culture of Violence at African Universities: An Inherited Ideological Trait. *Yesterday and Today*, 17, 38–63. <https://doi.org/10.17159/2223-0386/2017/n17a3>
- Juliana, R. P., Sihite, F., Maryen, M. M., Verani, R. R., Fahmi, N. B., Nugroho, A., & Hermawan, S. (2022). INSTRUKSI REFOKUS DAN RELOKASI APBD DALAM UPAYA MEMINIMALKAN INFLASI AKIBAT KENAIKAN HARGA BBM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), Article 3.
- Kebung, K. (2017). Membaca ‘Kuasa’ Michel Foucault dalam Konteks ‘Kekuasaan’ di Indonesia. *Melintas*, 33(1), 34–51. <https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2953.34-51>
- Makunike, B. (2015). The Zimbabwe Student Movement: Love-Hate Relationship With Government? *Journal of Student Affairs in Africa*, 3(1), 35–48. <https://doi.org/10.14426/jsaa.v3i1.91>
- Mankoff, M., & Flacks, R. (1971). The Changing Social Base of the American Student Movement. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 395, 54–67. <https://doi.org/10.2307/1038575>
- Marijan, K., & Fitrianto, H. (2013). ANATOMI KEKERASAN MAHASISWA DI MAKASSAR Kacung Marijan dan Hari Fitrianto. *Jurnal Review Politik*, 03, 1–27.
- Mashayekhi, M. (2001). The Revival of The Student Movement in Post-Revolutionary Iran. *International Journal of Politics, Culture and Society*, 15(2), 283–313. <https://doi.org/10.1023/A:1012977219524>
- Pezza, P. E. (1995). College Campus Violence: The Nature of The Problem and Its Frequency. *Educational Psychology Review*, 7(1), 93–103. <https://doi.org/10.1007/bf02214208>
- Slater, D. (2023). What Indonesian Democracy Can Teach the World. *Journal of Democracy*, 34(1), 95–109. <https://doi.org/10.1353/jod.2023.0006>
- Texas Politics—Civil Disobedience and Non-Violent Action. (n.d.). Retrieved June 2, 2023, from https://texaspolitics.utexas.edu/archive/html/ig/features/0607_01/slide4.html
- Thackeray, S., Robinson, S., Smith, P., Bruno, R., Kirschbaum, M., Bernacchi, C., Byrne, M., Cheung, W., Cotrufo, M., Gienapp, P., Hartley, S., Janssens, I., Jones, T., Kobayashi, K., Luo, Y., Penuelas, J., Sage, R., Suggett, D., Way, D., & Long, S. (2020). Civil disobedience movements such as School Strike for the Climate are raising public awareness of the climate change emergency. *Faculty of Science, Medicine and Health - Papers: Part B*, 1–3.
- Yusuf, R. I. (2023). *Komunikasi Politik: Seni dan Teori*. Deepublish.